

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sudan adalah negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sudan secara resmi mengumumkan partisipasinya dalam Abraham Accords pada tanggal 6 Januari 2021. Pengumuman ini menandai bergabungnya Sudan dengan Israel dan beberapa negara lain yang sebelumnya telah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian Abraham yang difasilitasi oleh Amerika Serikat memiliki tujuan utama memulihkan hubungan dua negara atau diplomatik antara Israel dan Sudan serta negara-negara Arab lainnya.

Perjanjian Abraham Accords ditandatangani langsung di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berlokasi di Khartoum oleh Menteri Pertahanan Sudan, Nasreddin Abdul Bari. Selain itu, penandatanganan perjanjian juga dilakukan bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Steven Mnuchin.<sup>1</sup> Kesepakatan ini dicapai setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok.<sup>2</sup> Dengan perjanjian ini, Sudan secara resmi menjadi negara keenam di

---

<sup>1</sup> Toi Staff Agencies, *Sudan Signs 'Abraham Accords' with US, Paving Way for Israel Normalization*, Times Of Israel, 2021, <https://www.timesofisrael.com/sudan-signs-abraham-accords-with-us-paving-way-for-israel-normalization/>.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, *Sudan Sepakat Normalisasi Hubungan Dengan Israel*, CNN Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201024002331-120-562224/sudan-sepakat-normalisasi-hubungan-dengan-israel>.

Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, bergabung dengan Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Bahrain, dan Yordania.<sup>3</sup>

Proses normalisasi hubungan diplomatik Sudan dan Israel terjadi secara tidak terduga dan dalam waktu singkat. Pada 25 Agustus 2020, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mike Pompeo, Perdana Menteri Sudan menegaskan bahwasanya pemerintahnya tidak memiliki kewenangan atas menormalisasi hubungan dengan Israel. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa saat itu Sudan masih belum siap atau belum berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel.<sup>4</sup> Namun, situasinya berubah dengan cepat. Hanya dalam waktu dua bulan, tepatnya pada 23 Oktober 2020, terjadi perkembangan politik signifikan antara Sudan dan Israel. Pada tanggal tersebut, Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik. Pengumuman ini menandai perubahan drastis dari sikap Sudan sebelumnya dan menunjukkan kemajuan pesat dalam proses normalisasi hubungan kedua negara.<sup>5</sup> Melalui inisiatif ini, Sudan dan Israel mengakhiri perselisihan mereka yang telah berlangsung lama. Pejabat tinggi dari kedua negara sepakat untuk memulai kolaborasi ekonomi dan komersial. Mereka juga

---

<sup>3</sup> Muhammad Bachrul Ulum, *Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel- Sudan : Antara Kepentingan Nasional Dengan Solidaritas Pembebasan Palestina*, Jurnal ICMES 5, no. 1 (2021): 88–107, <https://ic-mes.org/jurnal/index.php/jurnalICMES/article/download/102/56>.

<sup>4</sup> ALJAZEERA, *Sudan PM: Government Has 'No Mandate' to Normalise Israel Ties*, ALJAZEERA, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/8/25/sudan-pm-government-has-no-mandate-to-normalise-israel-ties>.

<sup>5</sup> ALJAZEERA, *Sudan Agrees to Normalise Relations with Israel, Trump Says*, ALJAZEERA, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/23/sudan-agrees-to-normalise-relations-with-israel-trump-says>.

berkomitmen bahwa perjanjian ini akan berkontribusi pada peningkatan stabilitas di kawasan.<sup>6</sup>

Keputusan dibukanya hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel menimbulkan kejutan bagi banyak pihak karena kedua negara memiliki hubungan yang buruk selama puluhan tahun. Hubungan yang kurang harmonis ini banyak dipicu oleh peran Sudan sebagai salah satu negara Arab yang konsisten mendukung Palestina dalam konflik dengan Israel. Sudan telah menunjukkan dukungannya terhadap Palestina sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1956, ketika Sudan menerapkan undang-undang boikot terhadap Israel sesuai dengan keputusan Liga Arab yang melarang negara-negara anggotanya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.<sup>7</sup> Contohnya adalah Undang-Undang pada tahun 1967 "*Three No's, no to peace with Israel, no recognition of Israel, and no negotiations with Israel.*"<sup>8</sup>

Meski hubungan Sudan dan Israel kurang ideal, namun ada sisi positif yang bisa menopang perekonomian Sudan yang saat ini kurang kondusif. Sudan mengalami perpecahan internal dengan Sudan Selatan pada tahun 2011, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Sebagian besar pendapatan negara, sekitar 75%, berasal dari sektor minyak yang kini dikuasai sepenuhnya oleh Sudan Selatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Sudan saat ini juga sepenuhnya ditangani oleh Sudan Selatan.<sup>9</sup> Meskipun Sudan telah berupaya untuk meningkatkan sektor

---

<sup>6</sup> Minister Of Amerika, *Joint Statement of the United States, the Republic of Sudan, and the State of Israel*, White House, 2020, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/joint-statement-united-states-republic-sudan-state-israel/>.

<sup>7</sup> Bachrul Ulum, *Op. Cit*, hal 90

<sup>8</sup> Africa News, *News Sudan Defends Normalising Ties with Israel as Gaza Conflict Erupts*, AFP, 2021, <https://www.africanews.com/2021/05/17/sudan-defends-normalising-ties-with-israel-as-gaza-conflict-erupts/>.

<sup>9</sup> Knopf Kate Almquist, *Ending South Sudan's Civil War*, Council Special Report, no. 77 (2016).

industri dan pertaniannya sebagai respons terhadap kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya sumber daya akibat perpecahan dengan Sudan Selatan, upaya tersebut belum cukup efektif dalam menyelamatkan perekonomian Sudan yang terpuruk.<sup>10</sup>

*“We pursue a vision of peace, security, and prosperity in the Middle East and worldwide. In this spirit, we warmly welcome and are encouraged by the progress already made in stabilizing diplomatic relations between Israel and its neighbors in the region under the principles of the Abraham Accords”*  
(The Abraham Accords Declaration)<sup>11</sup>

Meski akan banyak manfaat positif yang bisa diperoleh dari kesepakatan tersebut Perjanjian Abraham, pembukaan hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel, dipandang kontroversial. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam tindakan Sudan sebagai tindakan yang mengecewakan.<sup>12</sup> Karena hal tersebut dinilai telah melanggar Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab, Prakarsa Perdamaian Arab, resolusi Organisasi Kerja sama Islam serta Dewan Keamanan resolusi *The United Nation* nomor 1515 tahun 2003 yang menetapkan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.<sup>13</sup> Kemudian Yusuf Al-Utsaimin sebagai sekretaris jenderal Organisasi Kerjasama Islam mengancam atas Sudan untuk melakukan

---

<sup>10</sup>Acaps, *Socioeconomic Crisis*, acaps.org, 2022, <https://www.acaps.org/country/sudan/crisis/complex-crisis>.

<sup>11</sup> U.S Department of State, *The Abraham Accords Declaration*, state.gov, 2020, <https://www.state.gov/the-abraham-accords/>.

<sup>12</sup> Reuters, *Palestinian President Abbas Condemns Israel-Sudan Ties*, Reuters, 2020, <https://www.reuters.com/article/us-usa-sudan-israel-palestinians-abbas-idUSKBN2782HK>.

<sup>13</sup> United Nations, *Security Council of United Nations*, “Resolution 1515” (Amerika Serikat, 2003), <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/621/85/PDF/N0362185.pdf?OpenElement>.

kerjasama dengan Israel karena kerjasama ini seharusnya tidak terjadi sebelum Israel mengakhiri penjajahan terhadap negara Palestina.<sup>14</sup>

Perjanjian tersebut pun menarik perhatian dan menuai kritik bagi berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk penolakan dari partai politik di Sudan yang merupakan oposisi terhadap pembukaan hubungan diplomatik.<sup>15</sup> Di ibu kota Sudan, Khartoum, masyarakat Sudan ikut serta dalam demonstrasi menyusul pernyataan tiga negara terkait pembukaan hubungan diplomatik.<sup>16</sup> Survei yang dilakukan oleh tim Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menunjukkan bahwa 80% warga Palestina menganggap pembukaan hubungan diplomatik sebagai tindakan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dengan negara-negara Arab.

Peralihan kekuasaan yang dari sipil ke militer telah menimbulkan ketidakstabilan di Sudan. Hal ini mungkin menjadi alasan yang mendasari perubahan keputusan Sudan mengenai pembukaan hubungan diplomatik. Meskipun Sudan sebelumnya telah menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Israel, keputusan mendadak untuk membuka hubungan diplomatik ini patut untuk diselidiki lebih lanjut.

Dengan munculnya perjanjian suatu Abraham Accords yang difasilitasi oleh Israel dengan Amerika Serikat sebagai mediator, Sudan mendapat peluang penting untuk mengatasi keterpurukan ekonominya. Hal ini terutama berkaitan erat pada

---

<sup>14</sup> Eyad Nabulsi, *No Normalization until Israel Ends Occupation: OIC*, AA, 2020, <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/no-normalization-until-israel-ends-occupation-oic/1951994>.

<sup>15</sup> ALJAZEERA, 'Ignition of New War: Sudan Political Parties Reject Israel Deal', ALJAZEERA, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/sudans-political-parties-reject-israeli-normalisation-deal>.

<sup>16</sup> Ibid.

penguatan hubungan bilateral antara Sudan, Israel dan Amerika Serikat beserta sekutunya, serta pencabutan status Sudan sebagai negara pendukung aksi terorisme yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.<sup>17</sup> Pencabutan status tersebut membuka peluang bagi Sudan untuk terlibat dalam kerja sama mendapatkan dukungan dari negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel. Dengan kontribusi terhadap perjanjian tersebut diharapkan dapat Partisipasi Sudan dalam kesepakatan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di Sudan.<sup>18</sup>

Pada akhirnya, Sudan telah lama menjadi sasaran hukuman pada bidang ekonomi dan politik yang dilakukan oleh beberapa negara Barat. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, Sudan telah menerapkan perubahan secara signifikan dan menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dengan Israel. Dengan membuka jalinan hubungan diplomatik dengan Israel, Sudan mengharapkan bisa menghapus sanksi internasional yang dikenakan terhadapnya. Langkah ini juga diharapkan dapat membuka pintu bagi Sudan untuk terlibat dalam menarik investasi, perdagangan internasional, dan memperoleh bantuan luar negeri yang dapat memperkuat stabilitas politik dan ekonomi negaranya.

Sudan memilih bermitra dengan Israel karena profil Israel sebagai negara maju dengan teknologi maju di bidang energi terbarukan, air, pertanian, dan keamanan.<sup>19</sup> Dalam hal ini Sudan mampu mencari peluang kerja sama ekonomi

---

<sup>17</sup> bureau Of African Affairs, *U.S. Relations With Sudan*, state.gov, 2022, <https://www.state.gov/u-s-relations-with-sudan/>.

<sup>18</sup> J. Singer, *The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco*, *International Legal Materials* 60, no. 3 (2021): 463–448, <https://doi.org/10.1017/ilm.2021.18>.

<sup>19</sup> Michaël Tanchum, *The India-Middle East Food Corridor: How the UAE, Israel, and India Are Forging a New Inter-Regional Supply Chain*, *Middle Eastern Studies*, 2022,

dengan Israel untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dilakukannya kerjasama antara Sudan dan Israel hal ini juga dipicu oleh adanya kondisi domestik serta politik yang kacau. Pada saat ini Sudan menjalani transisi politik, di mana negara tersebut berusaha meningkatkan hubungan internasionalnya dan mencari dukungan global. Dalam konteks ini, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dipandang sebagai langkah positif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan penulis menyimpulkan bahwa terdapat masalah yang muncul yaitu **“Bagaimana kepentingan bagi Sudan dalam upaya pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020-2023 ?”**.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Salah satu sasaran utama penelitian adalah menelaah motivasi yang mendorong Sudan untuk menjalin relasi diplomatik dengan Israel. Penelitian bertujuan mengungkap landasan kepentingan strategis Sudan yang mendasari inisiatif menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi tersebut. Dengan kata lain, kajian ini berupaya memahami faktor-faktor kunci di balik keputusan Sudan untuk membuka saluran diplomatik resmi dengan Israel.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

---

<https://www.mei.edu/publications/india-middle-east-food-corridor-how-uae-israel-and-india-are-forging-new-inter>.

Penulis mengharapkan temuan studi ini dapat berkontribusi signifikan bagi riset selanjutnya, memperkaya wawasan dan pemahaman di bidang terkait. Diharapkan tulisan ini mampu memotivasi para pembaca yang berminat mengadakan penelitian serupa di kemudian hari. Lebih lanjut, penulis beraspirasi agar kajian ini dapat menjadi sumber rujukan yang bernilai dalam disiplin Hubungan Internasional, baik dari perspektif teoretis maupun analisis kasus yang dipaparkan dalam studi ini.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Peneliti mengharapkan studi ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasannya secara substansial. Melalui kajian ini, peneliti bermaksud memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang motif nasional Sudan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran yang berharga bagi peneliti dalam memperluas cakrawala pemikirannya mengenai topik tersebut.

#### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mendukung argumentasi pada penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa tinjauan pustaka sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:

Yang pertama adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Yulia Rimapradesi dan Ahmad Sahide yang berjudul “**Kepentingan negara-negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) dalam adanya normalisasi**

**hubungan dengan Israel”.**<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengapa terjadinya adanya normalisasi pada hubungan dengan Israel dinilai sebagai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan komitmen bersama dalam tujuan kemerdekaan Palestina. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencari pola hubungan harmonis sebelum tahun 2020, yang kemudian mengalami perubahan signifikan ketika beberapa negara Arab memutuskan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Data sebelum tahun 2020 merupakan landasan utama untuk memahami dinamika tersebut secara mendalam dan menganalisis implikasinya dalam konteks saat ini.

Penulis menggunakan kerangka teori pilihan rasional untuk menganalisis hasil penelitian ini. Teori ini digunakan untuk mengeksplorasi keterkaitan langkah negara-negara jazirah Arab dalam melakukan penormalisasian hubungan dengan Israel, yang sebelumnya merupakan pilihan rumit karena Israel tercatat sebagai negara yang dihindari negara-negara Arab untuk menjalin hubungan diplomatik bagi negara-negara Arab.. Fokus penelitian ini terutama pada perspektif ekonomi untuk menganalisis dampak perjanjian normalisasi yang telah ditandatangani oleh negara-negara Arab. Dalam kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa teori pilihan rasional memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana keputusan suatu negara dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan dan kerugian dalam konteks pembukaan hubungan diplomatik.

---

<sup>20</sup> Yulia Rimapradesi and Ahmad Sahide, *Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan Dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan Dengan Israel*, Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, no. March (2021): 67–84, <https://doi.org/10.33822/mjihi.v4i1.2673>.

Secara garis besar, prioritas negara-negara yang terlibat berpusat pada isu keamanan dan pertimbangan ekonomi, dengan rasionalitas kepentingan nasional menjadi pendorong utama bagi negara-negara Arab. Pengakuan AS terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat berpotensi mengubah dinamika antara Maroko dan Front Polisario yang didukung Aljazair. Langkah ini juga membuka peluang ekonomi baru dan memperluas pengaruh global Sudan. Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Israel memiliki kepentingan yang selaras dalam aspek ekonomi, meliputi penghapusan visa, serta penandatanganan kesepakatan bilateral terkait investasi, pariwisata, dan penerbangan langsung. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan normalisasi ini diinisiasi oleh tokoh seperti Donald Trump, dan berpotensi mengalami pergeseran di bawah administrasi baru AS yang dipimpin Presiden Joe Biden. Ringkasnya, parafrasa ini menyoroti kesamaan kepentingan ekonomi dan keamanan di antara negara-negara yang terlibat, sambil menekankan potensi perubahan kebijakan dengan pergantian kepemimpinan di AS.

Keterkaitan antara studi ini dan riset terdahulu terletak pada kesamaan topik, yakni normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kajian sebelumnya menitikberatkan pada inisiatif Israel yang difasilitasi Amerika Serikat melalui Abraham Accords, dengan penekanan khusus pada peran AS sebagai penengah antara Israel dan beberapa negara Timur Tengah yang memiliki relasi kurang harmonis. Sementara riset tersebut menganalisis kepentingan negara-negara Timur Tengah secara umum, studi ini memfokuskan diri pada Sudan sebagai objek utama. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mendalam terhadap motivasi Sudan dan Israel dalam menormalisasi hubungan diplomatik, dengan penekanan khusus pada

aspek ekonomi dan keamanan. Dengan demikian, studi ini memperdalam dan mempersempit fokus dari penelitian sebelumnya, memberikan perspektif yang lebih spesifik dan terperinci mengenai kasus Sudan.

Jurnal penelitian kedua ditulis oleh Joel Singer dengan judul “*The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco*”.<sup>21</sup> Dalam penelitiannya penulis memaparkan terkait *Abraham Accords Agreement* beserta negara-negara yang terlibat di dalamnya termasuk Sudan, dan juga menekankan komitmen Amerika Serikat dan Sudan untuk bekerja sama dengan mitra mereka guna mendukung upaya penguatan demokrasi di Sudan dalam ranah politik. Secara ekonomi, Israel berjanji untuk memberikan bantuan pangan berupa gandum kepada Sudan.

Hubungan antara studi ini dan penelitian Joel Singer terletak pada analisis upaya Sudan untuk melakukan normalisasi pada hubungan dua negara dengan Israel. Perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian Singer lebih menekankan pada perjanjian itu sendiri sebagai fokus utama, dengan perhatian khusus pada aspek-aspek kunci dalam proses normalisasi hubungan diplomatik, terutama dalam konteks Sudan. Sebaliknya, penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan memusatkan perhatian pada motivasi dan kepentingan Sudan untuk menjalin kerjasama dengan Israel. Selain itu, studi ini juga menganalisis kepentingan strategis Israel untuk mempercepat proses normalisasi hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Dengan demikian,

---

<sup>21</sup> Joel Singer, *Introductory Note To The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed By Israel With The U.A.E., Bahrain, Sudan, And Morocco*, *International Legal Materials* 60, no. 3 (2021): 448-463., <https://doi.org/10.1017/ilm.2021.18>.

sementara kedua penelitian membahas topik yang sama, studi ini memperluas cakupan analisis dengan menelaah kepentingan kedua belah pihak, memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang dinamika hubungan Sudan-Israel dalam konteks geopolitik regional yang lebih luas.

Penelitian ketiga yang merupakan jurnal yang ditulis oleh Asher Lubotzk yang berjudul **An Israeli-Sudanese Rapprochement? Context, Interests, and Implications.**<sup>22</sup> Penelitian ini mengkaji peluang untuk memulihkan hubungan antara Sudan dan Israel, dengan mempertimbangkan aspek politik, strategis, dan ekonomi yang terlibat. Sejarah panjang konflik dan interaksi antara kedua negara menambah kompleksitas proses rekonsiliasi. Sudan memiliki pertimbangan geopolitik dan domestik yang signifikan dalam menilai kemungkinan normalisasi dengan Israel, termasuk pengaruh dari Amerika Serikat dan investasi dari Uni Emirat Arab. Dinamika ini, serta perubahan politik internal setelah revolusi tahun 2019 di Sudan, berdampak pada sikap Sudan terhadap Israel.

Keterkaitan antara penelitian Asher Lubotzk dan studi ini terletak pada pembahasan latar belakang historis hubungan Sudan dan Israel sebelum proses rekonsiliasi. Lubotzk dalam penelitiannya mengeksplorasi motivasi Sudan untuk memperbaiki relasinya dengan Amerika Serikat dan meningkatkan posisinya di kancah internasional, yang menjadi faktor pendorong dalam keputusan dilakukannya normalisasi hubungan dengan Israel. Selain itu, penelitian ini mengambil fokus yang lebih spesifik dengan menganalisis kepentingan Sudan

---

<sup>22</sup> Asher Lubotzky, *An Israeli-Sudanese Rapprochement? Context, Interests, and Implications*, African Research Program 5, no. 4 (2020): 1–7.

dalam dua aspek krusial, yaitu sektor keamanan dan ekonomi. Kedua sektor ini menjadi elemen penting yang dibahas dalam perjanjian antara Sudan dan Israel. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki titik temu dalam mengkaji hubungan Sudan-Israel, studi ini memperdalam analisis dengan menyoroti aspek-aspek konkret dari kepentingan Sudan yang tercermin dalam perjanjian bilateral, memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang motivasi pragmatis di balik keputusan normalisasi hubungan.

Jurnal keempat merupakan suatu jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Bachrul Ulum dengan judul **Pro dan Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel-Sudan: Antara Kepentingan Nasional dan Solidaritas untuk Pembebasan Palestina**.<sup>23</sup> Penelitian ini beliau memaparkan terkait pro dan kontra atas hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Sudan dan Israel. Beliau menggunakan penelitian deskriptif dan metode kualitatif. Dimana hal ini bertujuan untuk mengkaji kondisi politik Sudan sebelum dan setelah normalisasi hubungan. Dengan membandingkan kedua situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan dan faktor yang mendorong Sudan untuk memutuskan normalisasi hubungan dengan Israel.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang meliputi konsep normalisasi dan kepentingan nasional. Teori normalisasi menggambarkan proses di mana dua negara yang sebelumnya mengalami ketegangan dan pemutusan hubungan diplomatik, kemudian memutuskan untuk menjalin kembali kerja sama

---

<sup>23</sup> Muhammad Bachrul Ulum, *Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel- Sudan : antara Kepentingan Nasional dengan Solidaritas Pembebasan Palestina*, Jurnal ICMES 5, no. 1 (2021): 88–107, <https://ic-mes.org/jurnal/index.php/jurnalICMES/article/download/102/56>.

guna menyelesaikan konflik masa lalu. Sementara itu, teori kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan motivasi pragmatis Sudan dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun hal ini berisiko mengingat posisi Sudan sebagai pendukung kuat perjuangan Palestina. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong Sudan menerima tawaran normalisasi dari Amerika Serikat. Runtuhnya rezim Omar Al-Bashir menciptakan peluang bagi Israel dan AS untuk menekan Sudan yang sedang menghadapi krisis ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan internasional. Penelitian ini juga mencatat adanya dukungan eksternal terhadap normalisasi hubungan kedua negara, yang dianggap menguntungkan kepentingan nasional Sudan dari segi politik dan ekonomi.

Sebagai negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi, Sudan berharap memperoleh dukungan internasional, terutama dari AS, melalui normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, penelitian ini menekankan bahwa fokus pada kepentingan nasional tidak boleh mengabaikan isu-isu penting seperti masalah Palestina dan solidaritas dengan negara-negara Islam lainnya. Keterkaitan antara penelitian ini dan studi Muhammad Bachrul Ulum terletak pada eksplorasi upaya Sudan dalam membuka hubungan diplomatik. Perbedaan utamanya adalah pada sudut pandang penelitian. Jurnal Ulum lebih berfokus pada respon AS terhadap Sudan sebagai negara yang diduga mendukung terorisme, serta mengulas perdebatan seputar kepentingan nasional Palestina dan negara-negara Islam terkait normalisasi hubungan dengan Israel. Sebaliknya, penelitian ini lebih menekankan pada upaya Sudan mengatasi masalah ekonomi dan keamanan, terutama dalam konteks embargo ekonomi oleh negara-negara Barat, khususnya AS. Normalisasi

hubungan dengan Israel dipandang sebagai solusi potensial untuk mengatasi hambatan ekonomi akibat embargo tersebut, yang diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi Sudan.

Penelitian kelima berupa jurnal yang ditulis oleh Abdulgani Bozkurt dan Mayada Kamal Eldeen dengan judul *Normalization of Sudanese and Israel Relations: From Hostility to Pragmatic Conciliation*.<sup>24</sup> Dalam hal ini beliau memaparkan terkait hubungan antara Israel dan Sudan telah mengalami perkembangan yang signifikan setelah kemerdekaan. Dimana beliau menggunakan *process-tracing method* guna menjelaskan terkait evolusi hubungan kedua negara. Dalam hal ini fokus analisa abdulgani melihat pada sejarah hubungan antara Sudan dan Israel dimana mengalami ketegangan, akan tetapi seiringnya berjalannya waktu mengalami perubahan yang baik dimana hal ini memicu kerja sama setelah kudeta rezim Omar al-Bashir. Dalam hal ini kebijakan luar negeri Sudan sangat condong pada negara Israel, hal ini dapat dibuktikan terhadap perjanjian yang memicu negara-negara Arab lainnya untuk menormalisasi hubungan kerjasama antara Israel contohnya pada *Abraham Accords Agreement*. Pada penelitian ini membantu untuk meningkatkan pemahaman terkait sejarah hubungan antara Sudan dan Israel, dengan ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara pasca pemberontakan tahun 1989 pada rezim Omar al-Bashir. Penelitian ini juga menekankan bahwa kerja sama atau konfrontasi Israel dengan Sudan dapat dipengaruhi oleh individu atau rezim yang berkuasa pada waktu tertentu.

---

<sup>24</sup> Mayada Kamal Abdulgani Bozkurt, *Normalization of Sudanese and Israeli Relations: From Hostility to Pragmatic Conciliation*, İctimaiyyat Sosyal Bilimler Dergisi 6, no. 1 (2022): 327–43, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2367093>.

Penelitian dengan artikel ini terletak pada fokus pembahasan. Artikel tersebut menekankan hubungan historis antara Sudan dan Israel, sehingga mendorong mereka untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, yang penulis pandang sebagai kelanjutan dari hubungan yang telah terjalin sebelum kemerdekaan Sudan. Namun penelitian ini tidak mendalami alasan di balik keputusan Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebaliknya, fokus utama tulisan ini adalah menelusuri alasan Sudan setuju menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan apa yang mendasari kepentingannya.

Penelitian keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Magdi El-Gizouli berjudul *“Sudan’s Normalization with Israel: In Whose Interests”*.<sup>25</sup> Penelitian ini berfokus pada kepentingan mendasar kedua negara. Israel mendukung pembukaan hubungan diplomatik dengan tujuan agar Sudan dikeluarkan dari daftar negara sponsor terorisme yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Perjanjian ini juga mendorong Sudan untuk mencari dukungan ekonomi yang fleksibel dari Israel dan Amerika Serikat, termasuk pengiriman minyak dan gandum senilai \$1,2 miliar. Israel menanggapi tuntutan ini dengan menyediakan gandum senilai \$5 juta. Disamping itu juga Sudan menawarkan kepada Israel senjata M-16 yang diproduksi mereka guna mensupport stabilitas keamanan wilayah Israel.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya. Artikel ini menyoroti perdebatan di kalangan elit politik Sudan mengenai pembukaan

---

<sup>25</sup> Magdi El-gizouli, *Sudan ’ s Normalization with Israel : In Whose Interests ? An Agreement with a History Dating Back to the Cold War*, (Arab, 2021), [https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab\\_Reform\\_Initiative\\_en\\_sudans-normalization-with-israel-in-whose-interests\\_19528.pdf](https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_en_sudans-normalization-with-israel-in-whose-interests_19528.pdf).

hubungan normal dengan Israel, dan beberapa di antaranya mendorong langkah tersebut. Penelitian ini juga menyoroiti kesepakatan *quid pro quo* yang diberikan Amerika Serikat kepada Sudan, yang memungkinkan campur tangan langsung AS dalam politik Sudan setelah Sudan dihapus dari daftar negara sponsor terorisme. Meskipun beberapa kepentingan dijelaskan, namun tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan penelitian ini fokus untuk menggali motivasi di balik keputusan Sudan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dengan tujuan untuk memberikan tambahan dan melengkapi temuan penelitian sebelumnya.

Jurnal penelitian ketujuh ditulis oleh Yoel Guzansky dan Sarah Feuer dengan judul *“The Abraham Accords at One Year: Achievements, Challenges, and Rekomendasi for Israel”*.<sup>26</sup> Kajian ini menguraikan kepentingan jangka panjang, pendorong jangka pendek, dan respons awal terhadap pembukaan hubungan diplomatik. Di balik aktivitas diplomasi tersebut, terdapat keselarasan antara arah jangka panjang penyatuan Israel dengan negara-negara Teluk dengan pemicu langsung dari pertimbangan politik domestik pemerintahan Amerika Serikat di Israel selama musim panas tahun 2020. Kajian ini juga memaparkan pemicu yang berasal dari Amerika Serikat. pengaruhnya dalam mendorong normalisasi antara Israel dan negara-negara Teluk, dengan Amerika Serikat memainkan peran sebagai promotor keuangan bagi negara-negara yang terlibat. Begitu pula dalam penelitian ini, Sudan diharapkan mendapat manfaat dari

---

<sup>26</sup> Yoel Guzansky and Sarah Feuer, *The Abraham Accords at One Year : Achievements , Challenges , and Recommendations for Israel*, The Institute for National Security Studies., 2021, 1–17, <https://www.inss.org.il/publication/abraham-accords-one-year-insights/>.

dibukanya hubungan diplomatik, seperti dikeluarkannya dari daftar Negara Sponsor Terorisme dan menerima paket bantuan sebesar \$1 miliar dari Bank Dunia.

Perbedaan yang mencolok antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisisnya. Penelitian sebelumnya telah membahas secara luas negara-negara Teluk yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik berfokus pada kepentingan Sudan dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan dampaknya terhadap dinamika regional, khususnya dalam konteks upaya Sudan dalam mengurangi pengaruh Iran di kawasan.

*Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu*

No	Judul dan Nama Peneliti	Teori/Konsep dan Metode	Hasil Penelitian
1).	<p><b>Kepentingan Negara – Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel</b></p> <p>Oleh : Yulia Rimapradesi, Ahmad Sahide.</p>	<p><b>Teori Konsep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(Rational Choice)</i></li> </ul> <p><b>Metodologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif</li> </ul>	<p>Jurnal ini menyoroti kepentingan masing-masing negara Arab dalam hubungan ini, khususnya keinginan Sudan untuk menghapuskan sebutan AS sebagai negara sponsor terorisme, yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara melalui investasi, bantuan dan pinjaman luar negeri. Penunjukan ini menyebabkan penurunan perekonomian Sudan. Selain itu, jurnal tersebut mencatat bahwa AS telah memberikan Sudan \$1 miliar untuk melunasi utangnya kepada Bank Dunia</p>

			sebagai bagian dari proses normalisasi.
2).	<p><i>The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco</i> Oleh: Joel Singer</p>	<p><b>Metodologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif</li> </ul>	<p>Artikel tersebut secara ringkas merangkum isi Perjanjian Abraham dan meliputi negara-negara yang terlibat, termasuk Sudan, yang telah dihapus dari daftar Negara Sponsor Terorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui perjanjian ini. Sudan, Amerika Serikat, dan Israel telah sepakat untuk mendukung integrasi Sudan ke dalam komunitas internasional. Selain itu, artikel tersebut menyoroti komitmen pada negara Amerika Serikat serta Sudan guna melakukan kerjasama membentuk mitra dalam menyokong pembangunan demokrasi di negara Sudan.</p>
3).	<p><i>An Israeli-Sudanese Rapprochement? Context, Interests, and Implications.</i> Oleh: Asher Lubotzky</p>	<p><b>Metodologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif</li> </ul>	<p>Artikel ini membahas tentang potensi rekonsiliasi hubungan Sudan dan Israel, meski kontroversi masih terjadi di Sudan terkait hubungan dengan Israel, namun ada tanda-tanda hubungan kedua negara bisa pulih dalam beberapa bulan terakhir. Sudan memiliki alasan geopolitik dan domestik untuk mempertimbangkan normalisasi dengan</p>

			<p>Israel. Meskipun perdamaian yang sepenuhnya hangat mungkin belum tercapai, hubungan yang lebih tenang sekalipun dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Israel.</p>
4).	<p><b>Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Sudan: Antara Kepentingan Nasional Dengan Solidaritas Pembebasan Palestina</b> Oleh ; Muhammad Bachrul Ulum.</p>	<p><b>Teori Konsep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Konsep Kepentingan Nasional</b></li> <li>• <b>Normalisasi</b></li> </ul> <p><b>Metodologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deskriptif</b></li> </ul>	<p>Jurnal ini menganalisis dinamika politik internal Sudan yang mempengaruhi keputusan normalisasi hubungan dengan Israel. Bab ini juga membahas bagaimana tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, berperan dalam keputusan ini.</p> <p>Selain itu, jurnal ini mengeksplorasi reaksi berbagai aktor domestik di Sudan, termasuk pemerintah, kelompok oposisi, dan masyarakat sipil. Normalisasi hubungan antara Israel dan Sudan mencerminkan konflik antara kepentingan nasional pragmatis dan solidaritas ideologis dengan Palestina. Meski ada yang memandang normalisasi sebagai langkah penting untuk keluar dari isolasi ekonomi dan politik, ada pula yang melihatnya sebagai pengabaian prinsip-prinsip moral</p>

			dan dukungan terhadap Palestina.
5).	<p><b><i>Normalization of Sudanese and Israeli Relations: From Hostility to Pragmatic Conciliation</i></b>  Oleh: Abdulgani Bozkurt, Mayada Kamal Eldeen</p>	<p><b>Metodologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Process-tracing</b></li> </ul>	<p>Studi ini mengeksplorasi elemen kontinuitas dan disrupsi dalam hubungan antara Sudan dan Israel. Historisnya, kedua negara telah saling bermusuhan, namun dinamika lapangan berubah setelah kudeta di Sudan. Transformasi ini, termasuk pemulihan hubungan melalui Abraham Accords, menunjukkan pentingnya menjelaskan evolusi kebijakan luar negeri Sudan. Kebijakan luar negeri Sudan mengalami perubahan dramatis setelah jatuhnya Presiden Omar al-Bashir. Perjanjian ini juga mencakup kesepakatan untuk menghapus utang Sudan sebesar \$1 miliar dan Sudan menerima bantuan dari Bank Dunia sebesar \$1 Miliar, yang kemudian Israel juga akan berkomitmen guna membangun perpolitikan serta mendukung rezim sipil di Sudan.</p>
6).	<p><b><i>Sudan's Normalization with Israel: In Whose Interests?</i></b>  Oleh: Magdi El-Gizoul</p>	<p><b>Metodologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deskriptif</b></li> </ul>	<p>Studi ini mengkaji kepentingan yang dimainkan antara kedua negara, di mana Israel mendukung pembukaan hubungan diplomatik berdasarkan upayanya untuk membantu Sudan</p>

		<p>menghapus dirinya dari daftar negara sponsor terorisme yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Sudan juga meminta dukungan ekonomi dari Israel dan Amerika Serikat, termasuk pengiriman minyak dan gandum senilai \$1,2 miliar. Israel merespons secara positif dengan menyediakan gandum senilai \$5 juta. Studi tersebut mencatat bahwa Sudan juga menawarkan kepada Israel senapan M-16 yang diproduksi di dalam negeri untuk mendukung keamanan Israel.</p>
7).	<p><b><i>The Abraham Accords at One Year: Achievements, Challenges, and Recommendations for Israel</i></b>  Oleh: Yoel Guzansky, Sarah Feuer</p>	<p>Artikel ini mengulas perkembangan, pencapaian, dan tantangan tahun lalu dalam hubungan diplomatik Sudan dengan Israel dan Timur Tengah. Bagi Sudan, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah harga yang harus dibayar setelah dikeluarkan dari daftar negara sponsor terorisme oleh Departemen Luar Negeri AS setelah 27 tahun. Dalam hubungan diplomatik tersebut, Sudan meminta paket bantuan senilai \$1 miliar dari Bank Dunia, yang</p>

		<p>menunjukkan bahwa orientasi hubungan Sudan-Israel didorong secara ekonomi. Studi tersebut juga mencatat bahwa hubungan diplomatik Sudan-Israel berbeda secara signifikan dibandingkan dengan negara tetangga. Kesenjangan ini muncul karena perjanjian Sudan-Israel belum memperbaiki hubungan bilateral secara signifikan, termasuk pembahasan perjanjian lanjutan, pertukaran duta besar, penerbangan langsung, nota kesepahaman terkait, dan partisipasi pelatihan bersama.</p>
--	--	---

## 1.5 Kerangka Teoritis

### 1.5.1 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan istilah yang menggambarkan ambisi suatu negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan seperti kebudayaan, ekonomi, dan militer.<sup>27</sup> Secara konseptual, Kepentingan Nasional mengacu pada konsep yang berakar pada pemikiran realis klasik dalam kajian Hubungan Internasional. Realisme menekankan bahwa negara adalah aktor utama yang bertindak untuk membela kepentingannya sendiri di atas segalanya. Namun pengertian Kepentingan Nasional masih merupakan konsep teoritis yang abstrak

<sup>27</sup> Arry Bainus dan Junita Budi Rachman, *Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional*, *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018): 109, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>.

dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara dalam literatur Hubungan Internasional. Konsep ini sering digunakan para peneliti sebagai landasan untuk menjelaskan perilaku negara, baik dalam konteks keamanan, ekonomi, dan diplomasi<sup>28</sup>

Dalam konteks pengambilan keputusan dalam politik luar negeri, kepentingan tidak selalu Dalam ranah pengambilan kebijakan luar negeri, sumber kepentingan tidak selalu berasal dari negara sebagai entitas tunggal, melainkan sering terkait dengan aspirasi kelompok atau individu tertentu. Studi ini menelaah motivasi Sudan dalam menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, dengan mengacu pada konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein. Nuechterlein berpendapat bahwa kepentingan nasional mencakup pemahaman mendalam tentang motif di balik tindakan suatu negara berdaulat. Konsep ini dapat melampaui batas-batas teritorial negara dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kepentingan Sudan sebagai negara, tetapi juga mempertimbangkan dinamika internal dan pengaruh eksternal yang membentuk keputusan normalisasi hubungan dengan Israel, memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang proses pengambilan keputusan dalam politik luar negeri Sudan.<sup>29</sup> Dari konsep yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein, kepentingan nasional merupakan kekuatan utama yang menggerakkan suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditentukan. Oleh karena itu, proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Donald E. Nuechterlein, *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, 2nd ed. (Inggris: Cambridge University Press, 2009), <https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>.

diharapkan sejalan dengan kepentingan nasionalnya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arah dan strategi diplomasi negara tersebut.

Dalam dinamika hubungan internasional, tiap negara memiliki agenda prioritas yang disebut kepentingan nasional, yang bertujuan menjamin kelangsungan dan kesejahteraan negaranya. Kepentingan nasional ini merupakan rangkaian aspirasi yang mencakup berbagai dimensi, termasuk sasaran, visi, misi, dan ambisi dalam aspek ekonomi, pertahanan, dan kultural yang ingin diwujudkan oleh suatu negara. Konsep kepentingan nasional ini menjadi kompas yang mengarahkan kebijakan dan tindakan suatu negara di kancah global. Ia mencerminkan tidak hanya kebutuhan dasar negara untuk bertahan, tetapi juga aspirasi jangka panjang untuk berkembang dan memperkuat posisinya dalam tatanan dunia. Dengan demikian, kepentingan nasional menjadi landasan fundamental bagi setiap negara dalam merumuskan strategi dan mengambil keputusan di arena internasional.<sup>30</sup> Kepentingan nasional berperan sebagai pondasi utama dan penggerak bagi suatu negara dalam membangun relasi diplomatik, baik dengan entitas negara lain maupun aktor non-negara. Signifikansinya sangat besar dalam membentuk arah kebijakan luar negeri, yang harus sejalan dengan agenda kepentingan nasional yang telah dirumuskan.

Keselarasan antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional menjadi kunci dalam upaya pencapaian sasaran strategis negara. Dengan kata lain,

---

<sup>30</sup> Scoot Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, 1st ed. (London: Palgrave, 2005), <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230005778>.

kepentingan nasional berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan langkah-langkah diplomasi dan interaksi internasional suatu negara. Dalam konteks ini, setiap keputusan dan tindakan dalam ranah hubungan luar negeri selalu dipertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan nasional. Hal ini menjadikan kepentingan nasional sebagai filter dan tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan luar negeri dalam mencapai tujuan-tujuan strategis negara.<sup>31</sup> Oleh karena itu, kepentingan nasional merupakan salah satu faktor krusial yang menjadi pertimbangan suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan mengambil keputusan diplomatik. Faktor ini memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prioritas strategis negara untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Menurut pengertian Kepentingan Nasional menurut Donald E. Nuechterlein terbagi menjadi empat penjelasan terkait pengertian kepentingan nasional, yaitu: *Economic Interest*, *Defence Interest*, *World Order* dan *Ideological Interest*.<sup>32</sup> Adapun defnisi dari keempat indikator tersebut:

1. *Economic Interest*, Kepentingan ekonomi merupakan salah satu aspek krusial yang bertujuan meningkatkan kapasitas perekonomian suatu negara, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi dinamika hubungan internasional. Tujuan utama dari kepentingan ekonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perumusan kebijakan strategis dan pengembangan kerjasama dengan negara-negara lain.

---

<sup>31</sup> Mark Weber and Michael Smith, *Foreign Policy In A Transformed World*, 1st ed. (Paris: Routledge Publisher, 2002), <https://www.routledge.com/Foreign-Policy-In-A-Transformed-World/Webber-Smith/p/book/9780139087578>.

<sup>32</sup> Donald. E. Nuchterlain, *Op.Cit*, hal 248

Implementasi kepentingan ekonomi ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk pembentukan aliansi ekonomi dan penjaliran hubungan bilateral atau multilateral yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi perekonomian dalam negeri. Salah satu manifestasi konkretnya adalah pembukaan jalur perdagangan internasional melalui kerjasama antar negara dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Dengan demikian, kepentingan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan internal, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam ekonomi global untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya nasional. Hal ini mencerminkan sifat saling ketergantungan dalam sistem ekonomi internasional kontemporer.

2. *Defence Interest*, fokus pada perlindungan fisik dan non fisik suatu negara dan rakyatnya dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Adanya ancaman dari luar kemudian mendorong kita untuk menyikapinya melalui pembentukan kebijakan luar negeri. Dalam teori ini, kepentingan keamanan memegang peranan penting dalam menunjang ketiga kepentingan lainnya dan pada dasarnya negara yang mempunyai pertahanan yang kuat akan meningkatkan rasa aman bagi kepentingannya di bidang lain.
3. *World Order* adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas politik dan sistem perekonomian negara serta mempertahankan nilai-nilai ideologi negara dari ancaman ideologi

negara lain guna menjaga jati diri negara. Hal ini kemudian dapat berdampak pada terciptanya rasa aman dan tenang di masyarakat.

4. *Ideological Interests* Kepentingan ideologi merupakan komponen integral dari kepentingan nasional yang berfokus pada upaya negara untuk mempertahankan dan melindungi sistem nilai serta norma yang dianut oleh masyarakatnya. Tujuannya adalah menjaga agar fondasi ideologis negara tetap kokoh dan tidak terkikis oleh pengaruh ideologi asing.

Keberagaman ideologi antar negara dapat berdampak signifikan terhadap dinamika sosial, berpotensi menciptakan friksi dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas ideologis menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kepentingan nasional. Negara berupaya untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap ide-ide global dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental yang membentuk identitas nasional. Hal ini mencerminkan pentingnya kepentingan ideologi dalam membentuk kohesi sosial dan stabilitas politik dalam negeri, sekaligus mempengaruhi posisi dan interaksi negara di kancah internasional. Dengan demikian, kepentingan ideologi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga warisan kultural dan identitas nasional, tetapi juga sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan strategi negara dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

Berdasarkan konsep kepentingan nasional yang telah dijelaskan, peneliti meyakini bahwa penjelasan Donald E. Nuchterlein erat kaitannya dengan topik yang akan peneliti selidiki. Paralel antara konsep dan topik yang akan dikaji adalah adanya desakan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru sebagai respons terhadap kepentingan nasional suatu negara. Artinya pengambil kebijakan akan terdorong untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional negara.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori kepentingan nasional sebagai landasan utama untuk mengeksplorasi motivasi di balik keputusan Sudan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun sebelumnya Sudan menunjukkan sikap oposisi karena dukungannya terhadap Palestina. Teori ini diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci terkait dua aspek utama kepentingan Sudan: ekonomi dan pertahanan-keamanan. Pada aspek ekonomi, analisis berfokus pada bagaimana normalisasi hubungan dapat mempengaruhi dan berpotensi menguntungkan perekonomian Sudan. Sementara itu, aspek pertahanan dan keamanan diteliti untuk menggali motif strategis Sudan dalam konteks keamanan nasional dan regional melalui pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap kedua aspek tersebut, penelitian ini bertujuan menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan Sudan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap nuansa dan pertimbangan strategis di balik pergeseran kebijakan luar negeri Sudan yang signifikan ini.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif untuk menganalisis situasi berdasarkan data yang tersedia. Fokus utamanya adalah mengamati dan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Studi ini akan mendalami kepentingan nasional Sudan dalam membangun hubungan diplomatik dengan Israel, serta menguraikan dinamika bilateral yang akhirnya mendorong keputusan Sudan untuk menormalisasi hubungan pada tahun 2020. Analisis akan mencakup eksplorasi mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan Sudan untuk mengambil langkah signifikan ini. Dengan pendekatan deskriptif ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang latar belakang, proses, dan motivasi di balik kebijakan luar negeri Sudan yang mengalami perubahan penting tersebut.

### **1.6.2 Metode Analisis**

Penelitian ini mengadopsi metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual berbagai fenomena, fakta, atau peristiwa yang relevan. Melalui pendekatan ini, berbagai aspek dari fenomena yang terjadi akan ditelaah secara mendalam, meliputi aktivitas, karakteristik, hubungan antar elemen, persamaan dan perbedaan, serta kondisi alamiah yang terkait. Sebagai bagian dari metodologi kualitatif, penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Dengan demikian, peneliti akan menganalisis dan menguraikan informasi dari

berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti.<sup>33</sup>

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.3.1 Batasan Waktu**

Dalam penelitian, sangat penting untuk menetapkan batasan masalah agar fokus penelitian dapat dijaga dan hasilnya relevan dengan latar belakang serta perumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, batasan waktu penelitian ini ditetapkan pada rentang tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2020 dipilih karena merupakan awal dari inisiasi Sudan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun pada saat itu hubungan diplomatik belum terbentuk sepenuhnya. Sementara itu, untuk tahun 2023 peneliti memilih dikarenakan ingin melihat sejauh mana kepentingan yang dilakukan oleh Sudan terhadap Israel dalam pembukaan hubungan diplomatik ini.

#### **1.6.3.2 Batasan Materi**

Ruang lingkup materi pada penelitian ini difokuskan pada kepentingan Sudan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan faktor-faktor pendorong Sudan memilih Israel sebagai mitra kerja sama. Penelitian ini akan menelusuri sejarah hubungan Sudan dan Israel, menguraikan kepentingan Sudan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, menganalisis alasan di balik pilihan Sudan terhadap Israel, dan mengidentifikasi potensi manfaat yang dapat diperoleh Sudan dari menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

---

<sup>33</sup> Tiur Asi Siburian, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, 2013, 1–100.

#### 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui penelitian kepustakaan atau dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan memegang peranan penting dalam proses penulisan karena merupakan tahap awal bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman terhadap topik yang akan diteliti. Setelah menentukan topik, peneliti melakukan penyelidikan terhadap literatur yang relevan dengan materi yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian karena melalui sumber literatur, peneliti dapat mengakses berbagai informasi terkait topik yang diteliti.<sup>34</sup>

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini mengandalkan berbagai sumber akademik dan media sosial yang relevan dengan topik hubungan diplomatik dan kepentingan nasional Sudan terhadap Israel. Sumber-sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, tesis, dan artikel, yang diidentifikasi menggunakan kata kunci yang spesifik. Untuk memfasilitasi proses pengumpulan data akademis, peneliti memanfaatkan aplikasi Publish or Perish. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Twitter untuk mendapatkan wawasan terkini mengenai diskusi publik seputar hubungan diplomatik kedua negara. Pendekatan multisumber ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang komprehensif dan up-to-date tentang dinamika hubungan Sudan-Israel.

---

<sup>34</sup> Galang Surya Gumilang, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*, Jurnal Fokus Konseling 2, no. 2 (2016), <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.

## 1.7 Argumen Pokok

Penelitian ini menyajikan argumen bahwa keputusan Sudan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel yang didorong oleh kepentingan nasional dan kebutuhan secara mendesak yang dilakukan guna mencapai kepentingan vital nasional. Kebutuhan tersebut antara lain upaya mengatasi krisis ekonomi, seperti peningkatan inflasi akibat kenaikan harga pangan dan devaluasi pound Sudan, merosotnya sektor minyak akibat pemisahan Sudan Utara dan Selatan, serta berbagai permasalahan dalam negeri yang dihadapi oleh Sudan karena konflik internal dan pengaruh negara lain. seperti Israel membantu pasukan Sudan Selatan dalam konflik sipil di Sudan. Dalam kerangka pengambilan keputusan yang rasional, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dianggap sebagai langkah terbaik untuk mencapai kepentingan nasional tersebut.

Dalam kerangka teori kepentingan nasional, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel diharapkan dapat membawa berbagai manfaat bagi Sudan dan mengakhiri isolasi internasional yang sudah berlangsung lama. Kepentingan utama pembukaan diplomatik ini adalah untuk menghapus status Sudan sebagai negara sponsor terorisme dan mendapatkan dukungan ekonomi dan politik dari negara-negara Barat. Secara khusus, setelah penggulingan Omar al-Bashir, yang tidak mendukung hubungan dengan negara-negara Barat, pemerintahan transisi ini diharapkan dapat membawa Sudan menuju perekonomian yang stabil, sistem politik yang demokratis, dan peningkatan keamanan. Sudan juga berharap mendapat bantuan ekonomi dari Israel khususnya di bidang teknologi pertanian dan berbagai sektor didalamnya mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan

lahan pertanian yang mencakup sekitar 80%. Dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Sudan dan Israel diharapkan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan mereka.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami, berikut adalah sistematika penulisannya dalam beberapa sub bab pembahasan:

**Tabel 1.2 Sistematika Penulisan**

<b>BAB</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PEMBAHASAN</b>
<b>I</b>	<b>Pendahuluan</b>	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teoritis 1.6 Metode Penelitian 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
<b>II</b>	<b>Keputusan Sudan Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Israel</b>	2.1 Kondisi Internal Sudan 2.1.1 Konflik antara Sudan dan Sudan Selatan 2.1.2 Ekonomi Sudan Setelah Konflik 2.1.3 Keamanan Sudan Setelah Konflik 2.2 Keterlibatan Israel Dalam Konflik Antara Sudan dan Sudan Selatan. 2.3 Kronologi pembukaan Hubungan Diplomatik Sudan dengan Israel
<b>III</b>	<b>Kepentingan Ekonomi Sudan dan Keamanan Sudan</b>	3.1 Kepentingan Ekonomi Sudan 3.1.1 Penghapusan Embargo Ekonomi Sudan 3.1.2 Inovator Pertanian dan Ketahanan Pangan oleh Israel 3.2 Kepentingan Keamanan Sudan 3.2.1 Penghapusan Sudan Dalam Daftar Negara Terorisme

		3.2.2 Kepentingan Sudan dalam Akses Informasi Intelejen
<b>IV</b>	<b>Kepentingan Tatanan Dunia dan Ideologi Sudan</b>	4.1 Kepentingan Ideologi Sudan 4.1.1 Persamaan Ideologi Demokrasi 4.1.2 Persamaan Konsepsi Kelompok Militan 4.1.3 Pandangan Positif Sudan Terhadap Peran Israel 4.2 Kepentingan Tatanan Dunia Sudan 4.2.1 Posisi Geopolitik Sudan di Kawasan MENA 4.2.2 Dukungan Sudan Terhadap Israel di Kawasan MENA 4.2.3 Dukungan Sudan Terhadap Amerika Serikat di Tananan Dunia
<b>V</b>	<b>Penutup</b>	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran

